

Kesenjangan Realisasi Anggaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Dengan Provinsi Banten Periode 2023

Maria Natalia Detryesi¹, Maryana Rohima², Nadya Tabitha³, Putri Alifah Avrilya⁴
Universitas Bina Sarana Informatika¹²³⁴, Jakarta, Indonesia
estibahur21@gmail.com¹, maryanarohima@gmail.com², nadyatabitha29@gmail.com³,
putrialifahavrilya@gmail.com⁴

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 12 Desember 2024 Halaman : 35-42	<i>This study analyzes the gap in the realization of regional revenue budget (APD) in DKI Jakarta Province and Banten Province in 2023. DKI Jakarta shows a higher level of APD realization compared to Banten, which is influenced by a more diverse fiscal capacity. In contrast, Banten has difficulty in optimizing regional original revenue (PAD) due to limited economic infrastructure and administrative capacity. Factors such as fiscal policy, economic base, and local socio-economic dynamics play an important role in the differences in budget performance between the two provinces. This study suggests a more adaptive financial management strategy, increasing PAD efficiency, and utilizing balancing funds to support more equitable and sustainable development.</i>
Keywords: Budget gap Revenue realization Local revenue	

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesenjangan realisasi anggaran pendapatan daerah (APD) di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten pada tahun 2023. DKI Jakarta menunjukkan tingkat realisasi APD yang lebih tinggi dibandingkan Banten, yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal yang lebih beragam. Sebaliknya, Banten mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) karena terbatasnya infrastruktur ekonomi dan kapasitas administrasi. Faktor-faktor seperti kebijakan fiskal, basis ekonomi, dan dinamika sosial-ekonomi lokal berperan penting dalam perbedaan kinerja anggaran antara kedua provinsi. Penelitian ini menyarankan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, peningkatan efisiensi PAD, serta pemanfaatan dana perimbangan untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kesenjangan anggaran, Realisasi pendapatan, Pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Sangat menarik untuk melihat laporan keuangan pemerintahan karena tuntutan atas akuntabilitas lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menunjukkan pertumbuhan sektor pemerintahan daerah yang menunjukkan pertumbuhan sektor publik di Indonesia. Laporan keuangan dibuat dan didistribusikan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. (Hasmi, 2022)

Dalam proses pembangunan, sebuah negara harus memiliki rencana yang memungkinkan peningkatan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah terpenting masyarakat dapat merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah, khususnya pembangunan manusia (Fachry Yahya, 2024). Akan tetapi, peningkatan pembangunan manusia tidak dapat dicapai hanya melalui pengawasan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan yang dikenal sebagai otonomi daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan nasional di seluruh daerah, terutama dalam hal meningkatkan tingkat pembangunan manusia.

Setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menghasilkan pendapatan mereka sendiri dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas pembangunan secara mandiri. Dengan demikian, sistem otonomi daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan potensi dan keinginan lokal. (Fachry Yahya, 2024)

Untuk mewujudkan otonomi daerah, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah meletakkan dasar untuk desentralisasi di bidang fiskal, politik, dan administrasi. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 membahas pembagian wewenang dan fungsi antara pemerintah daerah dan pusat. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur bagaimana wewenang dan fungsi dibagi antara pemerintah. Kedua undang-undang tersebut berfokus pada pembangunan otonomi daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, pemerataan, dan partisipasi masyarakat, serta kekayaan dan potensi sumber daya masing-masing daerah.

Dalam hal keuangan daerah, optimalisasi anggaran adalah tanggung jawab publik pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran yang efektif akan menghasilkan output yang maksimal, dan target harus dicapai untuk kepentingan masyarakat. Salah satu aspek perencanaan anggaran yang sangat penting adalah tantangan yang terjadi dalam peningkatan penerimaan daerah secara konsisten. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan pengeluaran daerah yang terus meningkat dapat menyebabkan Fiscal Gap meningkat. Kondisi seperti ini berdampak pada tingkat ekonomi dan kinerja pemerintah daerah, yang dapat menyebabkan underfinancing dan overfinancing (Meiriki et al., 2020).

Anggaran Pendapatan Daerah (APD) adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kemampuan fiskal suatu daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi anggaran juga menunjukkan seberapa efektif dan efisien pelaksanaan kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, dan kemampuan fiskal. Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta memiliki sumber pendapatan yang lebih besar dan basis ekonomi yang luas dan beragam. Selain itu, karena lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan DKI Jakarta, Provinsi Banten menghadapi tantangan tersendiri dalam meningkatkan PAD dan memaksimalkan potensi pendapatan lainnya.

Karena pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan fiskal nasional, tahun 2023 mungkin menjadi tahun yang menarik untuk diamati. Dalam situasi seperti ini, analisis tentang pelaksanaan APD di kedua provinsi sangat penting untuk memahami perbedaan dalam pengelolaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perbedaan dalam tingkat realisasi APD di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten pada tahun 2023. Fokus diskusi meliputi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tingkat realisasi, bagaimana hal itu berdampak pada pembangunan daerah, dan saran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan APD di kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu membangun kebijakan pajak daerah yang lebih adil dan berkelanjutan.

Menurut (Akuntansi et al., 2024), kesenjangan anggaran, juga disebut sebagai kesenjangan anggaran, terjadi ketika manajer memperkirakan pendapatan rendah atau dengan sengaja menurunkan biaya. Menurut (Anthony & Govindarajan, 2005), kesenjangan anggaran adalah perbedaan antara estimasi terbaik dan jumlah anggaran.

Kesenjangan anggaran dibuat agar target anggaran dapat dicapai dengan mudah karena potensi pendapatan seharusnya lebih besar daripada target anggaran. dan pengeluaran yang lebih besar daripada kebutuhan sebenarnya sehingga anggaran terpenuhi (Sula, 2021).

METODE

Berdasarkan pada judul penelitian dan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kausal yang inti permasalahan ini disebabkan faktor – faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara anggaran pendapatan daerah yang berakibat perbedaan realisasi anggaran pendapatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam kesenjangan realisasi anggaran pendapatan daerah (APD) di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten pada tahun 2023. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi fenomena, analisis, interpretasi terhadap faktor – faktor yang memengaruhi kesenjangan tersebut dengan menggunakan

data sekunder yaitu Laporan Tahunan Provinsi DKI Jakarta 2023 dan Laporan Tahunan Provinsi Banten 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Salah satu dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk Provinsi Banten, adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA memberikan gambaran tentang bagaimana pendapatan dan belanja daerah direalisasikan selama periode waktu tertentu, dan juga menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah

o Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah mencakup semua sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah provinsi, seperti:

o Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Meliputi pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

o Transfer dari Pemerintah Pusat:

Termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berikut ini adalah analisis realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, berdasarkan tabel atau data yang tersedia.

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2023	(Dalam Rupiah)		
				Realisasi 31 Desember 2023 (Audited)	(%)	Realisasi 31 Desember 2022 (Audited)
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	43.000.000.000.000	43.516.481.672.833	101,20	40.275.148.196.210
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	462.105.437.813	454.697.560.911	98,40	376.977.989.704
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	545.869.249.882	545.869.249.987	100,00	402.424.109.447
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	4.434.068.961.336	4.622.697.231.503	104,25	4.553.854.434.140
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		48.442.043.648.831	49.139.745.716.234	101,44	46.608.404.729.501
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					
9	Dana Perimbangan		20.189.140.030.470	20.124.459.645.034	99,68	18.831.174.546.549
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	17.025.414.266.070	17.049.968.680.672	100,14	16.062.089.109.337
11	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	22.179.718.000	22.179.718.000	-	-
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.3	3.076.020.400	3.076.020.400	100,00	34.127.101.188
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.4	3.138.470.026.000	3.049.235.325.962	97,16	2.734.958.336.024
14	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	29.684.233.000
15	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2	-	-	-	29.684.233.000
16	Dana Insentif Fiskal		35.175.027.000	35.175.027.000	100,00	-
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.3	35.175.027.000	35.175.027.000	100,00	-
18	Total Pendapatan Transfer (9 + 14 + 16)		20.224.315.057.470	20.159.634.672.034	99,68	18.860.858.779.549
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
20	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	1.996.577.429.044	1.766.153.820.454	88,46	2.821.215.663.258
21	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (20)		1.996.577.429.044	1.766.153.820.454	88,46	2.821.215.663.258
22	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 18 + 21)		70.662.936.135.345	71.065.534.207.722	100,57	67.290.479.172.308
23	BELANJA					
24	BELANJA OPERASI					
25	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1.a	18.778.026.066.648	17.977.776.327.870	95,74	17.705.440.378.717
26	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.1.b	27.281.511.012.549	25.824.444.605.296	94,66	23.613.048.650.099
27	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.1.c	258.000.000.000	220.704.491.741	89,03	270.632.758.937
28	Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.1.d	5.908.311.804.139	5.539.653.281.534	93,76	6.278.332.984.915
29	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.1.e	3.707.368.399.302	3.621.682.896.507	97,69	2.639.327.211.335
30	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.f	4.450.476.435.774	4.363.641.476.668	98,05	5.035.404.985.749
31	Jumlah Belanja Operasi (25 s/d 30)		60.383.693.518.412	57.556.903.079.616	95,32	55.542.186.969.752
32	BELANJA MODAL					
33	Belanja Tanah	5.1.2.1.1.2.a	837.728.164.500	442.600.308.470	52,83	880.953.900.338
34	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.1.2.b	3.085.131.092.839	2.822.976.130.249	91,50	1.798.854.059.095
35	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.1.2.c	2.598.806.970.333	1.653.055.663.410	64,65	1.735.904.917.006
36	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.1.1.2.d	4.222.738.767.561	3.799.027.573.476	89,97	4.264.727.292.528
37	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.1.2.e	147.778.730.773	139.600.392.693	94,47	127.754.673.737
38	Jumlah Belanja Modal (33 s/d 37)		10.850.193.726.006	8.857.260.068.298	81,63	8.808.194.842.704
39	BELANJA TAK TERDUGA					
40	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.1.3	554.562.887.668	-	-	29.976.747.630
41	Jumlah Belanja Tak Terduga (40)		554.562.887.668	-	-	29.976.747.630
42	Jumlah Belanja (31 + 38 + 41)		71.788.440.132.086	66.414.163.147.914	92,51	64.380.358.560.086
43	TRANSFER					
44	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
45	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.1.1.4	356.446.480.500	356.446.480.500	100,00	484.762.660.210
46	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (45)		356.446.480.500	356.446.480.500	100,00	484.762.660.210
47	Jumlah Transfer		356.446.480.500	356.446.480.500	100,00	484.762.660.210
48	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (42 + 47)		72.144.886.612.586	66.770.609.628.414	92,55	64.865.121.220.296
49	SURPLUS/DEFISIT (22 - 48)		(1.481.950.477.241)	4.294.924.579.308		2.425.357.952.012
50	PEMBIAYAAN					
51	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
52	Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	8.600.096.664.254	8.600.096.664.254	100,00	9.721.718.831.341
53	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	295.220.990.938	286.277.630.136	96,97	979.251.480.334
54	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.1.3.1.3	-	190.589.666	-	393.892.140
55	Jumlah Penerimaan (52 s/d 54)		8.895.317.655.192	8.886.564.894.056	99,90	10.701.364.203.815

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 31 Desember 2023 (Audited)	(%)	Realisasi 31 Desember 2022 (Audited)
56	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	5.434.678.551.982	4.836.397.306.901	88,99	3.492.066.426.925
58	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.2	1.802.671.036.394	1.802.671.036.394	100,00	1.034.559.064.848
59	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	5.1.3.2.3	176.017.589.575	-	-	-
60	Jumlah Pengeluaran (57 s/d 59)		7.413.367.177.951	6.639.068.343.295	89,56	4.526.625.491.573
61	PEMBIAYAAN NETO (55 - 60)		1.481.950.477.241	2.247.496.540.761		6.174.738.712.242
62	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (49 + 61)			6.542.421.120.069		8.600.096.664.254

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 12 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Pada bagian Pendapatan Daerah, tercatat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp49,13 triliun atau 101,44% dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp20,15 triliun atau 99,68% dari target, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp1,76 triliun atau 88,46%, yang berada sedikit di bawah target.

Untuk Belanja Daerah, total realisasi sebesar Rp66,41 triliun atau 92,51% dari target sebesar Rp71,78 triliun. Dari jumlah tersebut, Belanja Operasi mencakup Rp57,5 triliun atau 95,32% dari target, meliputi belanja pegawai, barang/jasa, dan hibah. Sementara itu, Belanja Modal tercatat sebesar Rp8,8 triliun atau 81,62%, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan irigasi.

Pada aspek Pembiayaan, penerimaan pembiayaan mencapai Rp8,88 triliun atau 99,90% dari target, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,63 triliun atau 89,56% dari target. Pengeluaran pembiayaan ini mencakup penyertaan modal kepada Pemda serta pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dilaporkan sebesar Rp2,54 triliun, yang menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2022, di mana sebelumnya mencapai Rp8,6 triliun. Penurunan ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, meskipun angka tersebut masih cukup signifikan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan. Diharapkan agar Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran secara maksimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat, dalam bidang infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Selain itu, diharapkan agar proses optimalisasi pajak daerah tetap berjalan dengan baik.

Berikut Adalah Analisis Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, berdasarkan Tabel atau Data yang tersedia.

Uraian	Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 31 Desember 2023 (Audited)	(%)
PENDAPATAN	Rp 38.282.680.000.000,00	Rp 39.721.510.000.000,00	103,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 16.039.560.000.000	Rp 16.965.510.000.000	105,77
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 569.350.000.000	Rp 393.050.000.000	69,03
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	Rp 212.260.000.000	Rp 200.370.000.000	94,4
Dipisahkan			
Lain-lain PAD yang Sah	Rp 2.188.010.000.000	Rp 2.271.970.000.000	103,84
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 19.009.180.000.000	Rp 19.830.900.000.000	104,32
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	Rp 16.385.640.000.000	Rp 16.386.600.000.000	100,01
Pendapatan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Rp 16.385.640.000.000	Rp 16.386.600.000.000	100,01
Pendapatan Lainnya			
Pendapatan Hibah	Rp 51.310.000.000	Rp 35.040.100.000	66,88
Lain - lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	Rp 20.010.000.000	Rp 18.350.000.000	91,69
Pendapatan transfer antar daerah	Rp 2.816.540.000.000	Rp 3.451.340.000.000	122,54
Jumlah Pendapatan Lainnya	Rp 2.887.860.000.000	Rp 3.504.730.100.000	121,34
BELANJA DAERAH			
Belanja Pegawai	Rp 13.122.700.000.000	Rp 11.722.230.000.000	89,33
Belanja Barang dan Jasa	Rp 13.976.000.000.000	Rp 13.729.420.000.000	98,24
Belanja Modal	Rp 6.519.090.000.000	Rp 6.775.410.000.000	103,93
BELANJA LAINNYA	Rp 7.165.450.000.000	Rp 7.947.120.000.000	110,91
Belanja Bagi Hasil	Rp 3.232.960.000.000	Rp 3.731.620.000.000	115,42
Belanja Bantuan Keuangan	Rp 2.046.790.000.000	Rp 1.941.550.000.000	94,86
Belanja Bunga	Rp 1.470.000.000	Rp 1.290.000.000	87,72
Belanja Subsidi	Rp 37.080.000.000	Rp 30.100.000.000	81,16
Belanja Hibah	Rp 1.524.460.000.000	Rp 2.113.760.000.000	138,66
Belanja Bantuan Sosial	Rp 70.140.000.000	Rp 70.260.000.000	100,17
Belanja Tidak Terduga	Rp 252.560.000.000	Rp 58.550.000.000	23,18
JUMLAH BELANJA DAERAH	Rp 40.783.240.000.000	Rp 40.174.170.000.000	98,51
Pembiayaan Daerah	Rp 2.500.056.000.000	Rp 2.472.690.000.000	98,89
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 2.973.540.000.000	Rp 2.955.230.000.000	99,38
sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp 2.973.540.000.000	Rp 2.677.230.000.000	90,04
Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp 278.000.000.000	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp 472.970.000.000	Rp 482.540.000.000	102,02
Pembentukan Dana Cadangan	Rp 281.250.000.000	Rp 301.250.000.000	107,11
Penyertaan Modal Daerah	Rp 48.230.000.000	Rp 39.730.000.000	82,37
Pembayaran Cicilan Pokok utang yang jatuh tempo	Rp 138.500.000.000	Rp 138.500.000.000	100
TEMPO			
Pemberian Pinjaman Daerah	Rp 5.000.000.000	Rp 3.070.000.000	61,34

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bagaimana anggaran daerah dilaksanakan. Laporan ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah Provinsi Banten menggunakan sumber daya keuangannya untuk mendukung program dan proyek pembangunan di berbagai bidang.

Pada bagian pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp39,72 triliun atau 103,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp38,28 triliun, menunjukkan kinerja yang baik dalam mengoptimalkan potensi pendapatan, terutama berlaku untuk pajak daerah yang menyumbang realisasi sebesar 105,77% dari target. Karena hasilnya kurang dari seratus persen, beberapa pos pendapatan seperti retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan masih perlu ditingkatkan.

Realisasi belanja daerah mencapai 98,53% dari target, atau Rp40,17 triliun. Belanja pegawai dan belanja barang/jasa menunjukkan tingkat penyerapan yang baik, tetapi belanja tidak terduga hanya menghasilkan 23,18%. Ini mungkin karena perencanaan yang terlalu tinggi atau kebutuhan mendesak yang rendah pada posisi tersebut. Sebaliknya, belanja hibah melampaui target hingga 138,66%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih suka membantu secara langsung masyarakat atau kelompok tertentu. Pada pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan mencapai 95,88 persen dari target, dan pengeluaran mencapai 102,02 persen. Ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan, termasuk pembayaran cicilan pokok utang daerah sebesar 100%.

Dengan pendapatan melampaui target dan belanja hampir sepenuhnya terserap, LRA Banten 2023 memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Meskipun demikian, beberapa elemen harus diperiksa, seperti mengoptimalkan pendapatan dari retribusi daerah dan efisiensi pengeluaran untuk tugas-tugas tertentu. Evaluasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan Provinsi Banten dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

DKI Jakarta, sebagai ibukota negara dan pusat ekonomi dan bisnis, memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam dan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, yang pasti akan mendapatkan PAD yang lebih tinggi dibandingkan Banten. Ada perbedaan yang signifikan antara realisasi anggaran pendapatan DKI Jakarta dan Banten. Kinerja anggaran kedua daerah ini juga dipengaruhi oleh variabel seperti potensi ekonomi, struktur pemerintah, dan berbagai kebijakan fiskal utamanya perbedaan dalam kontribusi sektor pajak daerah terhadap pendapatan total. DKI Jakarta, dengan basis ekonomi yang lebih luas dan aktivitas bisnis yang lebih besar, cenderung memiliki porsi pendapatan dari pajak daerah yang lebih besar dibandingkan Banten. Dari data Laporan Realisasi APBD di atas DKI Jakarta memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan daerah dibandingkan dengan Banten. Realisasi anggaran belanja yang tinggi di DKI Jakarta berkorelasi positif dengan kualitas layanan publik, infrastruktur yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran di Banten dapat menghambat upaya percepatan pembangunan daerah.

Anggaran belanja DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai jumlah yang jauh lebih besar yaitu Rp 71.788.440.132.086 untuk anggaran dan Rp 66.414.163.147.914 untuk realisasi dibandingkan dengan anggaran Provinsi Banten, yang hanya mencapai Rp 40.783.240.000.000 untuk anggaran dan Rp 40.174.170.000.000 untuk realisasi. Perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan adanya disparitas dalam kemampuan kedua daerah dalam mengelola dan menyerap anggaran.

Faktor Penyebab Kesenjangan

Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan provinsi DKI Jakarta dan Banten untuk mengoptimalkan sumber daya dan potensi fisik mereka, ada perbedaan dalam realisasi anggaran kedua daerah tersebut. Faktor-faktor ini termasuk elemen struktural, manajemen, dan kondisi ekonomi yang berbeda yang ada di setiap wilayah. Untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengurangi disparitas pendapatan antara provinsi, penting untuk memahami penyebab utama kesenjangan ini. Berikut adalah beberapa komponen utama yang berkontribusi terhadap ketidaksesuaian dalam realisasi anggaran pada tahun 2023:

1. Perbedaan Struktur Ekonomi. Sektor jasa dan manufaktur memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta. Banten, di sisi lain bergantung pada industri dan pertanian, dengan kontribusi yang berbeda-beda tergantung pada wilayahnya. Meskipun kota-kota seperti Cilegon dan Tangerang memiliki industri yang kuat, wilayah lain seperti Pandeglang dan Lebak masih bergantung pada pertanian. (Dprd & Banten, n.d.)

- PDRB Per Kapita: PDRB per kapita di DKI Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Banten. Dengan PDRB Banten sebesar Rp 189,04 Triliun pada tahun 2022, kontribusinya terhadap PDRB Jawa hanya 6,88%. (Banten, 2023)

2. Akses Infrastruktur.

Kualitas Infrastruktur : Provinsi DKI Jakarta memiliki infrastruktur yang lebih baik dan lebih terintegrasi, termasuk fasilitas umum dan transportasi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun beberapa daerah di Banten, seperti Tangerang mendapat manfaat dari ekonomi Jakarta, banyak daerah di Selatan Banten masih kekurangan infrastruktur. (Dprd & Banten, n.d.)

Berbeda dengan Banten, Jakarta berkonsentrasi pada infrastruktur besar untuk mengatasi urbanisasi, sedangkan Banten berkonsentrasi pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan

3. Kebijakan Ekonomi, Investasi, dan Manajemen Fiskal

- Kebijakan Pembangunan : Kesenjangan ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak merata di Banten. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata di seluruh provinsi, sektor-sektor unggulan belum sepenuhnya digunakan (Togi Haidat M, Erlandy Lasproito S, Rizal s, 2024).

- Investasi Asing Dan Domestik : DKI Jakarta menarik investasi asing dan domestik lebih banyak daripada Banten, meningkatkan lapangan kerja dan peluang ekonomi (Banten, 2023)
- Manajemen Fiskal : DKI Jakarta mendapatkan manfaat dari penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak sementara Banten menghadapi kesulitan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Rekomendasi Kebijakan

- **Banten :**
 - Tingkatkan inovasi dalam pengelolaan pajak daerah dan pendapatan lain – lain .
 - Perluasan basis pajak dengan memperkuat sektor ekonomi produktif.
- **DKI Jakarta :**
 - Perbaiki perencanaan proyek besar untuk mengurangi SiLPA.
 - Optimalisasi belanja modal agar menghasilkan dampak langsung yang lebih besar bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, dan efisiensi pengelolaan anggaran yang berbeda menunjukkan perbedaan dalam realisasi anggaran antara DKI Jakarta dan Banten. Dimungkinkan untuk mengambil pelajaran dari kesuksesan provinsi untuk memperbaiki tata kelola keuangan di tingkat daerah. Secara keseluruhan, Laporan Realisasi APBD DKI Jakarta tahun 2023 menunjukkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, dengan pencapaian pendapatan yang melebihi target dan belanja daerah yang efektif. Meskipun demikian, pengelolaan APBD Provinsi Banten pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik dengan tingkat serapan anggaran yang meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan masih ada ruang untuk meningkatkan efektifitas belanja modal dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak tertentu. Namun, belanja daerah yang sangat rendah menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk kategori tersebut harus dievaluasi.

REFERENCES

- Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Syarif, N. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Banten*.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen*. salemba empat.
- Banten, B. (2023). S. Sipagi. <https://sipagi.bantenprov.go.id/>
- Dprd, A. H. U. K. U. M., & Banten, P. (n.d.). *Analisis disparitas infrastruktur fisik dan sosial ekonomi di provinsi banten*. 1–9.
- Fachry Yahya. (2024). *PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, RASIO KETERGANTUNGAN, RASIO EFEKTIVITAS, DAN RASIO EFISIENSI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN*.
- Hasmi, N. (2022). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa*. 2.
- Meiriki, A., Musharianto, A., & Ns, N. L. (2020). *Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah*. 3(1), 10–19.
- Sula, K. (2021). *Determinan kesenjangan anggaran di kabupaten kepulauan sula*. 4.
- Togi Haidat M, Erlandy Lasproito S, Rizal s, D. D. (2024). *Analisis Sektor Basis (Sektor Unggulan) dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Banten pada masa Pandemi Covid-19 Base Sector Analysis (Leading Sector) and Income Inequality in Banten Province during the Covid-19 Pandemic*. 4(1), 488–504.